

FRAMING PEMBERITAAN DUGAAN KORUPSI CHROMEBOOK KEMENDIKBUD PADA KOMPAS.COM DAN DETIK.COM

Moh Ainur Ridha

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Al Azhar Indonesia, Jl. Sisingamangaraja, Selong, Kby. Baru, Jakarta Selatan
ainurridho764@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the media framing of alleged corruption in the Chromebook procurement program at the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology (Kemendikbud) as reported by Kompas.com and Detik.com. The case attracted significant public attention because it was related to the national education digitalization program funded by a substantial state budget. This research employed a qualitative approach using Robert N. Entman's framing analysis model, which consists of four elements: define problems, diagnose causes, make moral judgment, and treatment recommendation. The data were collected from fourteen news articles, comprising seven articles from Kompas.com and seven articles from Detik.com covering the development of the alleged corruption case. The findings reveal that Kompas.com tends to frame the issue as a public policy and governance problem within the education digitalization program, particularly in the planning stage. In contrast, Detik.com emphasizes the legal aspects of the case by focusing on investigations, the designation of suspects, and the resulting state financial losses. These differences indicate that media organizations play a significant role in constructing social reality through the selection and emphasis of particular facts. This study contributes to the literature on media framing of corruption issues in the education sector and demonstrates how online media shape public understanding of the same event through different perspectives.

Keywords: media framing, corruption, Chromebook, Kompas.com, Detik.com.

PENDAHULUAN

Korupsi masih menjadi salah satu persoalan yang mendapatkan perhatian besar dalam kehidupan politik dan pemerintahan di Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Dalam era keterbukaan informasi, perkembangan kasus korupsi hampir selalu menjadi konsumsi publik melalui pemberitaan media massa. Media tidak hanya berfungsi sebagai saluran penyampaian informasi, melainkan juga berperan dalam membentuk pemahaman masyarakat mengenai suatu peristiwa melalui proses seleksi, interpretasi, dan penonjolan fakta tertentu. Dengan demikian, realitas yang diterima publik pada dasarnya merupakan hasil konstruksi media terhadap peristiwa yang diberitakan.

Perkembangan teknologi informasi telah memperkuat posisi media online sebagai sumber informasi utama masyarakat. Kecepatan penyajian berita, kemudahan akses, dan pembaruan informasi secara real time menjadikan media online memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembentukan opini publik. Media online tidak sekadar menyampaikan fakta, tetapi juga menentukan bagaimana fakta tersebut dipahami oleh khalayak. McQuail menjelaskan bahwa media massa memiliki kemampuan untuk membentuk persepsi sosial melalui proses produksi dan distribusi informasi yang dilakukan secara terus-menerus kepada masyarakat luas

(McQuail, 2010). Oleh karena itu, pemberitaan mengenai suatu kasus korupsi berpotensi menghasilkan pemaknaan yang berbeda ketika disajikan oleh media yang berbeda.

Perubahan pola konsumsi media dalam masyarakat digital telah menyebabkan media online menjadi salah satu sumber utama pembentukan opini publik di Indonesia. Kemudahan akses informasi melalui perangkat digital memungkinkan masyarakat memperoleh berita secara cepat dan berkelanjutan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kondisi ini menyebabkan media online memiliki posisi strategis dalam menentukan isu apa yang dianggap penting oleh masyarakat serta bagaimana isu tersebut dipahami oleh publik.

Berbeda dengan media cetak yang memiliki siklus produksi yang relatif lebih panjang, media online dituntut untuk menghadirkan informasi secara cepat dan terus diperbarui mengikuti perkembangan peristiwa. Karakteristik tersebut memengaruhi praktik jurnalistik, termasuk dalam proses pemilihan fakta, penentuan narasumber, serta penggunaan judul dan diksi tertentu yang dianggap mampu menarik perhatian pembaca. Akibatnya, proses produksi berita dalam media online tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan jurnalistik, tetapi juga oleh dinamika persaingan antar media dalam memperoleh perhatian audiens.

Dalam konteks tersebut, framing menjadi salah satu strategi penting yang digunakan media dalam mengorganisasi informasi dan menyederhanakan kompleksitas suatu peristiwa. Melalui framing, media menentukan aspek mana

yang dianggap penting untuk ditampilkan serta aspek mana yang dianggap kurang relevan sehingga tidak memperoleh perhatian yang sama besar. Proses ini menyebabkan khalayak tidak menerima realitas secara utuh, melainkan menerima realitas yang telah dipilih, disusun, dan ditonjolkan oleh media.

Pada isu korupsi, praktik framing memiliki implikasi yang sangat besar karena dapat memengaruhi persepsi masyarakat mengenai siapa yang dianggap bertanggung jawab, tingkat keseriusan persoalan, serta bentuk penyelesaian yang dianggap paling tepat. Oleh karena itu, analisis framing menjadi penting untuk memahami bagaimana media menjalankan perannya dalam membentuk pemahaman publik terhadap berbagai persoalan sosial dan politik di Indonesia.

Dalam sistem demokrasi modern, media massa memiliki fungsi yang tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi, tetapi juga menjalankan peran sebagai pengawas sosial (*watchdog*) terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan sumber daya publik. Melalui fungsi pengawasan tersebut, media berkontribusi dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Dalam konteks pemberantasan korupsi, media sering kali menjadi institusi yang berperan penting dalam mengungkap, mengawal, dan menjaga perhatian publik terhadap berbagai kasus yang melibatkan penyelenggara negara maupun lembaga publik. Oleh karena itu, pemberitaan

mengenai korupsi tidak hanya memiliki dimensi informatif, tetapi juga dimensi politik, sosial, dan moral yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap institusi yang terlibat.

Perkembangan media digital dalam dua dekade terakhir semakin memperkuat posisi media online sebagai aktor penting dalam pembentukan opini publik. Karakteristik media online yang mengutamakan kecepatan, aktualitas, serta kemampuan memperbarui informasi secara terus-menerus menjadikan media digital memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan isu apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Di sisi lain, kompetisi antar media dalam memperoleh perhatian pembaca juga memengaruhi cara media memilih sudut pandang, menentukan narasumber, serta menonjolkan aspek tertentu dari suatu peristiwa. Kondisi tersebut menyebabkan pemberitaan media tidak pernah sepenuhnya bersifat netral karena setiap media memiliki kebijakan redaksional, nilai berita, serta orientasi institusional yang berbeda-beda.

Perkembangan media digital telah mengubah pola pemberitaan korupsi di Indonesia. Jika pada era media cetak pemberitaan cenderung bersifat periodik dan memiliki ruang yang terbatas, media online memungkinkan proses peliputan dilakukan secara cepat, berkelanjutan, dan real time. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat dapat mengikuti perkembangan kasus korupsi secara lebih intensif dibandingkan sebelumnya.

Namun demikian, tingginya kecepatan arus informasi juga menimbulkan tantangan baru dalam praktik jurnalistik. Persaingan antar media

dalam memperoleh perhatian pembaca berpotensi mendorong penggunaan judul yang lebih sensasional serta penonjolan aspek tertentu yang dianggap memiliki nilai berita tinggi. Oleh karena itu, analisis framing menjadi semakin relevan untuk memahami bagaimana media digital membentuk persepsi masyarakat terhadap kasus korupsi yang sedang berkembang.

Salah satu kasus yang memperoleh perhatian luas dalam beberapa waktu terakhir adalah dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Program pengadaan Chromebook merupakan bagian dari kebijakan digitalisasi pendidikan yang dirancang untuk mendukung transformasi pembelajaran berbasis teknologi di Indonesia. Program tersebut melibatkan anggaran negara dalam jumlah besar dan ditujukan untuk meningkatkan akses pendidikan digital pada berbagai daerah. Namun, dalam perkembangannya, program ini menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan yang kemudian menjadi objek penyelidikan aparat penegak hukum.

Program digitalisasi pendidikan merupakan salah satu agenda strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis teknologi di Indonesia. Melalui program tersebut, pemerintah berupaya memperluas akses terhadap perangkat digital bagi sekolah-sekolah di berbagai daerah, termasuk daerah dengan keterbatasan infrastruktur pendidikan. Salah satu bentuk implementasi kebijakan tersebut adalah pengadaan

laptop berbasis sistem operasi Chrome OS atau Chromebook yang diharapkan mampu mendukung kegiatan belajar mengajar berbasis teknologi informasi.

Penggunaan Chromebook pada awalnya dipandang sebagai solusi yang efisien karena memiliki harga yang relatif lebih rendah dibandingkan perangkat dengan spesifikasi sejenis serta terintegrasi dengan berbagai layanan pendidikan digital. Namun demikian, kebijakan tersebut kemudian memunculkan berbagai kritik terkait kesesuaian spesifikasi perangkat dengan kondisi infrastruktur pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah yang masih memiliki keterbatasan akses internet. Perdebatan mengenai efektivitas penggunaan Chromebook semakin meningkat ketika aparat penegak hukum mulai melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan dalam proses pengadaannya.

Munculnya dugaan korupsi dalam program digitalisasi pendidikan menjadikan kasus ini memiliki dimensi yang berbeda dibandingkan kasus korupsi pada sektor lainnya. Selain berkaitan dengan penggunaan anggaran negara, kasus ini juga berkaitan dengan kualitas layanan pendidikan serta keberhasilan transformasi digital nasional. Oleh karena itu, cara media mengonstruksi realitas kasus ini menjadi penting untuk dipahami karena dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pendidikan pemerintah.

Korupsi pada sektor pendidikan memiliki konsekuensi yang lebih luas dibandingkan korupsi pada sektor lainnya karena secara langsung

berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia dan masa depan generasi muda. Ketika penyimpangan terjadi pada sektor pendidikan, dampaknya tidak hanya berupa kerugian keuangan negara, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas layanan pendidikan yang diterima masyarakat. Dalam konteks pembangunan nasional, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang menentukan daya saing bangsa sehingga setiap bentuk penyimpangan dalam pengelolaan anggaran pendidikan memiliki implikasi sosial yang sangat besar.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa korupsi pada sektor pendidikan dapat mengurangi efektivitas kebijakan publik, memperlebar kesenjangan akses pendidikan, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan dan pemerintah. Oleh karena itu, pemberitaan mengenai dugaan korupsi pada sektor pendidikan tidak hanya dipahami sebagai isu hukum semata, tetapi juga sebagai isu sosial yang menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.

Dalam konteks program digitalisasi pendidikan, dugaan penyimpangan pengadaan Chromebook menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mendorong transformasi pendidikan berbasis teknologi. Ketika program strategis nasional dihadapkan pada dugaan korupsi, perhatian masyarakat tidak hanya tertuju pada proses hukum, tetapi juga pada keberlanjutan kebijakan pendidikan yang sedang dijalankan pemerintah.

Kasus Chromebook memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan berbagai kasus korupsi yang sebelumnya banyak diteliti. Jika sebagian besar kasus korupsi yang menjadi perhatian media berkaitan dengan sektor politik, infrastruktur, atau sumber daya alam, dugaan korupsi Chromebook berkaitan langsung dengan kebijakan pendidikan dan transformasi digital nasional. Posisi pendidikan sebagai sektor strategis dalam pembangunan manusia menjadikan kasus ini tidak hanya dipahami sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai persoalan kebijakan publik yang berdampak pada kualitas layanan pendidikan. Oleh karena itu, cara media mengonstruksi realitas kasus ini menjadi penting untuk dikaji karena dapat memengaruhi persepsi publik terhadap kebijakan pendidikan dan aktor yang terlibat di dalamnya.

Dalam perspektif konstruksi sosial, realitas yang dipahami masyarakat bukanlah sesuatu yang hadir secara objektif dan diterima begitu saja, melainkan dibentuk melalui proses sosial yang berlangsung secara berkelanjutan. Media massa merupakan salah satu institusi yang memiliki peran penting dalam proses tersebut. Melalui pemilihan sumber informasi, penggunaan bahasa, penentuan sudut pandang, dan penonjolan aspek tertentu dari suatu peristiwa, media menghasilkan konstruksi realitas yang dapat berbeda satu sama lain. Perbedaan konstruksi tersebut menyebabkan suatu peristiwa yang sama dapat dimaknai secara berbeda oleh khalayak tergantung pada media yang menjadi sumber informasinya.

Berger dan Luckmann (1966) menjelaskan bahwa realitas sosial terbentuk melalui tiga proses utama, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Eksternalisasi merupakan proses ketika individu maupun institusi menghasilkan berbagai bentuk tindakan, simbol, dan makna dalam kehidupan sosial. Objektivasi terjadi ketika hasil dari proses tersebut diterima sebagai kenyataan sosial yang dianggap wajar dan objektif oleh masyarakat. Sementara itu, internalisasi merupakan proses ketika individu menerima dan mengadopsi realitas sosial tersebut sebagai bagian dari pemahamannya mengenai dunia sosial.

Dalam konteks komunikasi massa, media berperan penting pada ketiga tahapan tersebut. Media menghasilkan berbagai representasi mengenai peristiwa sosial melalui proses produksi berita, kemudian menyebarkan representasi tersebut kepada masyarakat secara luas. Ketika representasi tersebut diterima secara berulang oleh khalayak, informasi tersebut berpotensi menjadi bagian dari realitas sosial yang dianggap benar oleh masyarakat. Oleh karena itu, media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki kekuatan dalam membentuk dan mereproduksi realitas sosial.

Untuk memahami bagaimana media membangun makna terhadap suatu peristiwa, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis framing. Entman menjelaskan bahwa framing merupakan proses seleksi aspek tertentu dari realitas yang kemudian dibuat lebih menonjol dalam teks komunikasi untuk mendorong definisi

masalah, interpretasi penyebab, evaluasi moral, dan rekomendasi penyelesaian tertentu (Entman, 1993). Melalui framing, media tidak hanya memberitakan apa yang terjadi, tetapi juga membentuk cara publik memahami mengapa suatu peristiwa terjadi, siapa yang dianggap bertanggung jawab, dan bagaimana solusi terhadap persoalan tersebut seharusnya dilakukan. Model framing Entman menjadi salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam penelitian komunikasi karena mampu mengidentifikasi proses konstruksi realitas yang dilakukan media secara sistematis.

Menurut Entman (1993), framing pada dasarnya merupakan proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas sehingga aspek tersebut menjadi lebih terlihat, lebih bermakna, dan lebih mudah diingat oleh khalayak dibandingkan aspek lainnya. Framing tidak hanya menentukan informasi apa yang disampaikan media kepada publik, tetapi juga menentukan bagaimana informasi tersebut dipahami dan dimaknai oleh masyarakat. Dalam praktik jurnalistik, framing dapat muncul melalui pemilihan kata, penggunaan sumber berita, penentuan sudut pandang, maupun penempatan informasi tertentu dalam struktur pemberitaan.

Entman menjelaskan bahwa terdapat empat perangkat utama dalam proses framing, yaitu *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgement*, dan *treatment recommendation*. Tahap *define problems* berkaitan dengan bagaimana media mendefinisikan inti persoalan yang sedang terjadi. Tahap *diagnose causes* berkaitan dengan

siapa atau apa yang dianggap sebagai penyebab munculnya persoalan tersebut. Selanjutnya, *make moral judgement* digunakan untuk memberikan penilaian moral terhadap aktor maupun tindakan yang diberitakan, sedangkan *treatment recommendation* berkaitan dengan solusi atau langkah penyelesaian yang dianggap tepat oleh media terhadap persoalan yang sedang terjadi. Keempat perangkat tersebut memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi proses konstruksi realitas yang dilakukan media secara sistematis.

Meskipun framing dan agenda setting merupakan dua konsep yang berbeda, keduanya memiliki hubungan yang erat dalam studi komunikasi massa. Jika agenda setting menjelaskan kemampuan media dalam menentukan isu apa yang dianggap penting oleh masyarakat, maka framing menjelaskan bagaimana media membentuk cara masyarakat memahami isu tersebut. Dengan kata lain, agenda setting berkaitan dengan apa yang dipikirkan masyarakat, sedangkan framing berkaitan dengan bagaimana masyarakat memikirkan suatu isu tertentu.

Dalam pemberitaan korupsi, kedua konsep tersebut sering bekerja secara bersamaan. Media tidak hanya menentukan bahwa kasus korupsi layak memperoleh perhatian publik, tetapi juga menentukan aspek mana dari kasus tersebut yang dianggap paling penting untuk dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, analisis framing menjadi penting untuk memahami dinamika pembentukan opini publik terhadap isu korupsi di era media digital.

Dalam praktik jurnalistik, framing tidak hanya dilakukan melalui pemilihan fakta, tetapi juga melalui penggunaan bahasa, metafora, kutipan narasumber, serta penempatan informasi tertentu dalam struktur berita. Bahasa memiliki posisi penting dalam proses framing karena pilihan kata tertentu dapat menghasilkan penekanan makna yang berbeda terhadap peristiwa yang sama. Oleh karena itu, analisis framing tidak hanya memperhatikan apa yang diberitakan media, tetapi juga bagaimana media menyampaikan informasi tersebut kepada khalayak.

Dalam isu korupsi, penggunaan istilah seperti "penyalahgunaan kewenangan", "kerugian negara", "mafia anggaran", atau "kegagalan tata kelola" dapat menghasilkan persepsi yang berbeda mengenai sifat dan tingkat keseriusan suatu persoalan. Media secara aktif menggunakan bahasa untuk membangun definisi masalah, menentukan aktor yang dianggap bertanggung jawab, serta mengarahkan perhatian publik pada solusi tertentu.

Dengan demikian, bahasa bukan sekadar alat penyampaian informasi, tetapi juga instrumen ideologis yang digunakan media dalam membentuk realitas sosial di ruang publik

Penelitian mengenai framing media terhadap kasus korupsi telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sovianti (2019) menemukan bahwa Detik.com dan Kompas.com memiliki cara yang berbeda dalam membingkai pemberitaan penangkapan Setya Novanto dalam kasus korupsi E-KTP. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa

media dapat menghasilkan konstruksi realitas yang berbeda terhadap peristiwa yang sama. Penelitian Ananda, Sumartias, dan Nugraha (2019) mengenai pemberitaan korupsi massal DPRD Kota Malang di Detik.com menunjukkan bahwa media cenderung membangun citra tertentu terhadap aktor politik melalui strategi framing yang digunakan. Hildansyah, Nur, dan Pauji (2022) juga menemukan bahwa framing media dapat memengaruhi persepsi publik terhadap aktor penegak hukum dalam kasus korupsi Gubernur Papua.

Kajian yang lebih mutakhir dilakukan oleh Nabilla, Muharromah, dan Putri (2024) yang membandingkan pemberitaan kasus korupsi timah pada Kompas.com dan Detik.com. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kedua media memiliki kecenderungan framing yang berbeda dalam menampilkan isu korupsi. Kompas.com lebih menekankan analisis dan konteks yang lebih mendalam, sedangkan Detik.com lebih berfokus pada perkembangan aktual peristiwa dan aspek faktual kasus. Temuan serupa juga terlihat dalam penelitian Triwanto dkk. (2025) mengenai pemberitaan kasus dugaan korupsi impor gula pada Kompas.com yang menunjukkan bahwa media berperan aktif dalam membentuk persepsi publik melalui penekanan aspek tertentu dari realitas yang diberitakan. Sementara itu, Permatasari dan Yuanti (2026) menemukan bahwa penggunaan bahasa dan strategi framing dalam pemberitaan kasus korupsi Pertamina berpengaruh terhadap pembentukan

persepsi publik mengenai akuntabilitas, moralitas, dan tanggung jawab institusi yang terlibat.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah mengkaji framing media terhadap kasus korupsi, sebagian besar penelitian masih berfokus pada korupsi politik, korupsi pejabat publik, korupsi sektor pertambangan, serta korupsi pada badan usaha milik negara. Penelitian mengenai konstruksi media terhadap dugaan korupsi yang berkaitan dengan kebijakan digitalisasi pendidikan nasional masih relatif terbatas. Dengan demikian, terdapat ruang penelitian yang perlu diisi untuk memahami bagaimana media online mengonstruksi realitas dugaan korupsi Chromebook Kemendikbud.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan framing pemberitaan dugaan korupsi pengadaan Chromebook Kemendikbud pada Kompas.com dan Detik.com menggunakan model analisis framing Robert N. Entman. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai cara media mengonstruksi realitas kasus korupsi di sektor pendidikan sekaligus memperkaya kajian komunikasi massa, khususnya penelitian framing pada media online di Indonesia.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian
Sumber: Diolah Peneliti berdasarkan model framing Robert N. Entman (1993)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis framing. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami makna, interpretasi, dan konstruksi realitas yang dibangun media terhadap suatu peristiwa sosial (Creswell, 2014). Analisis framing digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana media memilih, menonjolkan, dan mengorganisasi fakta sehingga menghasilkan pemaknaan tertentu bagi khalayak (Entman, 1993; Eriyanto, 2018).

Objek penelitian ini adalah pemberitaan mengenai dugaan korupsi pengadaan Chromebook Kemendikbud yang dipublikasikan oleh Kompas.com dan Detik.com. Kedua media dipilih karena merupakan media online nasional dengan tingkat pembaca yang tinggi serta memiliki karakteristik pemberitaan yang berbeda. Kompas.com dikenal lebih menonjolkan konteks dan analisis dalam pemberitaannya, sedangkan Detik.com lebih berorientasi pada kecepatan dan aktualitas informasi. Perbedaan karakteristik

tersebut memungkinkan munculnya konstruksi realitas yang berbeda terhadap isu yang sama

Pemilihan Kompas.com dan Detik.com dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua media tersebut merupakan portal berita nasional dengan tingkat kunjungan yang tinggi dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembentukan opini publik di Indonesia. Selain itu, kedua media memiliki karakteristik editorial yang berbeda dalam praktik pemberitaan. Kompas.com dikenal lebih menonjolkan konteks, kedalaman analisis, dan aspek kebijakan dalam pemberitaannya, sedangkan Detik.com lebih berorientasi pada kecepatan penyampaian informasi dan perkembangan aktual suatu peristiwa. Perbedaan karakteristik tersebut memungkinkan munculnya variasi framing terhadap isu yang sama sehingga menarik untuk dianalisis secara komparatif.

Pemilihan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan relevansi berita terhadap tujuan penelitian. Kriteria berita yang dipilih meliputi: (1) berita yang secara langsung membahas dugaan korupsi pengadaan Chromebook Kemendikbud, (2) berita yang memuat informasi mengenai aktor yang terlibat, proses penyidikan, atau kebijakan pengadaan, dan (3) berita yang diterbitkan pada periode berkembangnya penyelidikan kasus oleh aparat penegak hukum. Dengan menggunakan kriteria tersebut, diperoleh empat belas berita yang dianggap representatif untuk menggambarkan pola framing pada masing-masing media.

Kompas.com merupakan salah satu media online nasional yang berkembang dari tradisi jurnalisme surat kabar Kompas yang telah lama dikenal memiliki orientasi pada kedalaman informasi, verifikasi, serta penyajian konteks yang komprehensif dalam pemberitaannya. Karakteristik tersebut memengaruhi pola pemberitaan Kompas.com yang cenderung menghadirkan latar belakang peristiwa, penjelasan kebijakan, serta implikasi sosial dari suatu isu yang diberitakan.

Dalam berbagai penelitian komunikasi, Kompas.com sering dipandang sebagai media yang mengedepankan pendekatan kontekstual dalam pemberitaan isu politik dan kebijakan publik. Pendekatan tersebut memungkinkan pembaca memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai hubungan antara suatu peristiwa dengan kondisi sosial, ekonomi, maupun politik yang melatarbelakanginya.

Sementara itu, Detik.com berkembang sebagai media digital yang sejak awal dikenal dengan karakteristik kecepatan dan aktualitas informasi. Sebagai salah satu pelopor portal berita daring di Indonesia, Detik.com memiliki kekuatan utama pada kemampuan menghadirkan perkembangan peristiwa secara real time kepada masyarakat. Karakteristik tersebut menyebabkan pemberitaan Detik.com cenderung lebih berorientasi pada dinamika peristiwa, perkembangan kasus, serta informasi terbaru yang berkaitan dengan isu yang sedang berlangsung.

Perbedaan karakteristik editorial antara Kompas.com dan Detik.com menjadi salah satu

alasan utama pemilihan kedua media tersebut dalam penelitian ini. Dengan karakteristik yang berbeda, kedua media memiliki potensi menghasilkan konstruksi realitas yang berbeda terhadap kasus yang sama.

Data penelitian berupa teks berita yang memuat informasi mengenai dugaan korupsi pengadaan Chromebook Kemendikbud. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan mengumpulkan berita yang dipublikasikan selama periode penyelidikan kasus oleh aparat penegak hukum. Berita dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2022). Sampel penelitian terdiri atas tujuh berita dari Kompas.com dan tujuh berita dari Detik.com yang secara khusus membahas perkembangan kasus, aktor yang terlibat, proses penyelidikan, serta respons berbagai pihak terhadap dugaan korupsi tersebut.

Analisis data dilakukan menggunakan model framing Robert N. Entman yang terdiri atas empat perangkat analisis, yaitu *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgement*, dan *treatment recommendation* (Entman, 1993). Keempat elemen tersebut digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana media mendefinisikan masalah, menentukan penyebab, memberikan penilaian moral, serta menawarkan solusi terhadap peristiwa yang diberitakan. Prosedur analisis dilakukan dengan mengidentifikasi pola framing pada masing-masing media kemudian membandingkan hasil

temuan untuk melihat perbedaan konstruksi realitas yang dibangun oleh Kompas.com dan Detik.com (Eriyanto, 2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis framing dilakukan menggunakan model Robert N. Entman yang meliputi empat elemen, yaitu *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgement*, dan *treatment recommendation* (Entman, 1993). Analisis dilakukan terhadap tujuh berita Kompas.com dan tujuh berita Detik.com yang membahas dugaan korupsi pengadaan Chromebook Kemendikbud.

Tabel 1. Framing Kompas.com

Elemen Framing Entman	Temuan
Define Problems	Dugaan korupsi diposisikan sebagai penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan Chromebook yang tidak sesuai kebutuhan pendidikan Indonesia
Diagnose Causes	Penyebab masalah dikaitkan dengan kebijakan pengadaan yang mengarahkan penggunaan Chrome OS dan dugaan intervensi aktor tertentu
Make Moral Judgement	Tindakan para pihak dipandang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan kepentingan pendidikan nasional
Treatment Recommendation	Penegakan hukum, penyidikan menyeluruh, dan evaluasi kebijakan digitalisasi pendidikan

Temuan ini menunjukkan bahwa Kompas.com membingkai dugaan korupsi Chromebook sebagai persoalan tata kelola kebijakan publik, bukan semata-mata tindak pidana korupsi. Dalam perspektif Entman (1993),

media melakukan proses *define problems* dengan menempatkan kebijakan digitalisasi pendidikan sebagai pusat persoalan yang diberitakan. Pemilihan sudut pandang tersebut menunjukkan adanya upaya media untuk mengarahkan perhatian publik pada aspek kebijakan dibandingkan pada individu tertentu sebagai pelaku utama.

Pada dimensi *diagnose causes*, Kompas.com tidak secara langsung memusatkan perhatian pada individu tertentu sebagai penyebab utama permasalahan, melainkan pada proses pengambilan kebijakan dan mekanisme pengadaan yang dianggap bermasalah sejak tahap perencanaan. Temuan ini menunjukkan bahwa Kompas.com cenderung menggunakan pendekatan struktural dibanding pendekatan personal dalam menjelaskan penyebab terjadinya dugaan korupsi tersebut.

Pada aspek *make moral judgement*, Kompas.com membangun penilaian moral bahwa kebijakan pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan pendidikan nasional berpotensi bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan pada dimensi *treatment recommendation*, media lebih menekankan pentingnya evaluasi kebijakan digitalisasi pendidikan disertai penegakan hukum secara menyeluruh

Temuan tersebut juga terlihat dari pilihan narasumber yang digunakan dalam pemberitaan Kompas.com. Media ini relatif lebih banyak menghadirkan pernyataan dari pengamat kebijakan, akademisi, maupun pihak yang memahami proses pengadaan dan kebijakan

pendidikan nasional. Pemilihan narasumber tersebut memperkuat kecenderungan Kompas.com dalam menempatkan kasus Chromebook sebagai persoalan tata kelola kebijakan publik dibandingkan sekadar persoalan hukum semata.

Selain itu, penggunaan istilah seperti "kebijakan digitalisasi pendidikan", "evaluasi program", dan "efektivitas penggunaan Chromebook" menunjukkan adanya upaya media untuk menghubungkan kasus dugaan korupsi dengan konteks kebijakan pendidikan yang lebih luas. Dengan demikian, pemberitaan tidak hanya berfokus pada dugaan pelanggaran hukum, tetapi juga pada konsekuensi kebijakan terhadap kualitas pendidikan nasional.

Dalam perspektif konstruksi sosial, pilihan diksi dan sudut pandang tersebut menunjukkan bahwa Kompas.com melakukan proses objektivasi terhadap persoalan kebijakan pendidikan sebagai inti dari peristiwa yang sedang terjadi. Ketika pemberitaan semacam ini diproduksi dan dikonsumsi secara berulang oleh masyarakat, publik berpotensi memahami kasus Chromebook sebagai kegagalan tata kelola kebijakan pendidikan dibandingkan sebagai tindakan individual para aktor tertentu.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa framing yang dibangun Kompas.com memiliki karakteristik yang serupa dengan hasil penelitian Nabilla, Muharromah, dan Putri (2024) yang menemukan bahwa Kompas.com cenderung memberikan ruang yang lebih besar terhadap konteks kebijakan dan latar belakang peristiwa dibandingkan perkembangan aktual kasus.

Karakteristik tersebut memperlihatkan adanya konsistensi orientasi editorial Kompas.com dalam memberitakan isu korupsi di Indonesia.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa proses framing Kompas.com juga terlihat dari penggunaan diksi yang cenderung berorientasi pada kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan. Dalam sejumlah pemberitaan yang dianalisis, Kompas.com lebih sering menggunakan istilah seperti "kebijakan digitalisasi pendidikan", "evaluasi program", "efektivitas penggunaan Chromebook", dan "pengambilan keputusan". Pilihan istilah tersebut menunjukkan bahwa media berupaya menempatkan kasus Chromebook dalam konteks kebijakan pendidikan nasional yang lebih luas.

Penggunaan diksi semacam ini memiliki implikasi terhadap cara publik memahami peristiwa yang sedang terjadi. Alih-alih memandang kasus tersebut semata-mata sebagai persoalan hukum individu, publik diarahkan untuk melihat adanya persoalan struktural yang berkaitan dengan proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik.

Dalam perspektif framing, penggunaan bahasa merupakan salah satu instrumen utama dalam proses konstruksi realitas karena pilihan kata tertentu dapat memengaruhi fokus perhatian pembaca terhadap aspek tertentu dari suatu peristiwa. Oleh karena itu, pemilihan istilah yang digunakan Kompas.com memperlihatkan adanya kecenderungan untuk menghubungkan kasus dugaan korupsi dengan persoalan tata kelola

pemerintahan dan kualitas kebijakan pendidikan nasional.

Temuan ini menunjukkan bahwa framing tidak hanya terjadi melalui pemilihan fakta atau narasumber, tetapi juga melalui penggunaan bahasa dan simbol yang digunakan media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Tabel 2. Framing Detik.com

Elemen Framing Entman	Temuan
Define Problems	Dugaan korupsi diposisikan sebagai kasus hukum yang merugikan negara
Diagnose Causes	Penyebab masalah dikaitkan dengan tindakan para tersangka dalam mengarahkan pengadaan Chrome OS
Make Moral Judgement	Perilaku para aktor dinilai sebagai penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian negara
Treatment Recommendation	Penetapan tersangka, proses penyidikan, dan pertanggungjawaban hukum

Berdasarkan hasil analisis, Detik.com melakukan proses *define problems* dengan menempatkan dugaan korupsi Chromebook sebagai kasus hukum yang berkaitan dengan kerugian negara dan proses penyidikan oleh Kejaksaan Agung. Penonjolan terhadap pemeriksaan saksi, penetapan tersangka, serta perkembangan penyidikan menunjukkan bahwa media lebih memfokuskan perhatian pada dimensi kriminalitas dibandingkan aspek kebijakan pendidikan.

Pada dimensi *diagnose causes*, Detik.com lebih menonjolkan tindakan individu dan dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh para aktor yang terlibat dalam proses pengadaan Chromebook. Pendekatan ini menunjukkan bahwa media menggunakan pola personalisasi terhadap penyebab masalah sehingga perhatian publik lebih diarahkan pada pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab secara hukum.

Pada aspek *make moral judgement*, Detik.com membangun penilaian moral bahwa tindakan para aktor yang terlibat merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang merugikan negara. Sementara pada dimensi *treatment recommendation*, media lebih menekankan pentingnya proses penyidikan, penetapan tersangka, serta pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang terlibat.

Kecenderungan tersebut juga terlihat dari pemilihan narasumber yang digunakan oleh Detik.com. Dalam sebagian besar pemberitaannya, Detik.com lebih banyak mengutip pernyataan aparat penegak hukum, penyidik, maupun pejabat Kejaksaan Agung yang terlibat langsung dalam proses penyelidikan kasus. Dominasi narasumber dari institusi penegak hukum menyebabkan pemberitaan lebih berorientasi pada perkembangan penyidikan dan langkah hukum yang sedang berlangsung.

Pilihan penggunaan istilah seperti "kerugian negara", "pemeriksaan saksi", "penetapan tersangka", dan "penyidikan" memperlihatkan bahwa Detik.com berupaya membangun persepsi publik bahwa inti persoalan terletak pada aspek

pidana korupsi dan pertanggungjawaban hukum para aktor yang terlibat. Strategi framing semacam ini sejalan dengan karakteristik media online yang mengutamakan aktualitas dan perkembangan peristiwa secara cepat kepada pembaca.

Dari perspektif konstruksi sosial, proses framing yang dilakukan Detik.com memperlihatkan adanya penekanan pada aspek kriminalitas sebagai realitas utama yang harus dipahami masyarakat. Dengan demikian, publik berpotensi melihat kasus Chromebook terutama sebagai persoalan penegakan hukum dibandingkan persoalan kebijakan pendidikan nasional.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian Sovianti (2019) yang menunjukkan bahwa Detik.com memiliki kecenderungan untuk menonjolkan perkembangan peristiwa dan dinamika proses hukum dibandingkan konteks kebijakan yang lebih luas. Pola tersebut menunjukkan adanya konsistensi pendekatan editorial Detik.com dalam memberitakan berbagai kasus korupsi di Indonesia.

Berbeda dengan Kompas.com, Detik.com lebih banyak menampilkan dinamika penyidikan, pemeriksaan saksi, serta potensi kerugian negara. Hal ini menunjukkan bahwa proses *define problems* pada Detik.com diarahkan pada aspek kriminalitas dan penegakan hukum. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sovianti (2019) yang menemukan bahwa Detik.com memiliki kecenderungan untuk menonjolkan perkembangan aktual peristiwa dan proses hukum dalam pemberitaan kasus korupsi E-KTP.

Perbedaan framing tersebut memperlihatkan bahwa media tidak bertindak sebagai saluran informasi yang netral, melainkan sebagai aktor sosial yang secara aktif mengonstruksi realitas melalui seleksi dan penonjolan fakta tertentu. Dalam perspektif Berger dan Luckmann (1966), realitas sosial merupakan hasil proses konstruksi yang berlangsung secara terus-menerus melalui interaksi sosial dan institusi sosial, termasuk media massa. Oleh karena itu, perbedaan konstruksi yang dihasilkan Kompas.com dan Detik.com menunjukkan bahwa khalayak berpotensi menerima pemahaman yang berbeda terhadap kasus yang sama tergantung media yang dikonsumsi.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan orientasi editorial antara Kompas.com dan Detik.com dalam mengonstruksi realitas dugaan korupsi Chromebook Kemendikbud. Kompas.com cenderung menghadirkan konteks kebijakan publik dan tata kelola pendidikan secara lebih luas, sedangkan Detik.com lebih menekankan dinamika proses hukum dan perkembangan penyidikan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sovianti (2019) yang menemukan bahwa Kompas.com cenderung memberikan konteks yang lebih mendalam dalam pemberitaan kasus korupsi, sementara Detik.com lebih berorientasi pada aktualitas dan perkembangan peristiwa. Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Nabilla, Muharromah, dan Putri (2024) yang menunjukkan bahwa kedua media memiliki kecenderungan framing yang berbeda meskipun memberitakan kasus korupsi

yang sama. Dengan demikian, perbedaan framing pada kasus Chromebook menunjukkan adanya karakteristik editorial yang berbeda dalam praktik pemberitaan media online di Indonesia

Perbedaan framing yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai saluran distribusi informasi, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memiliki kemampuan untuk menentukan aspek mana dari suatu realitas yang dianggap penting oleh masyarakat. Dalam perspektif Entman (1993), proses seleksi dan penonjolan fakta tertentu merupakan inti dari praktik framing yang dilakukan media massa.

Pada kasus Chromebook, Kompas.com lebih banyak melakukan penonjolan terhadap aspek kebijakan pendidikan, proses pengambilan keputusan, dan tata kelola program digitalisasi pendidikan. Sebaliknya, Detik.com lebih menonjolkan dinamika penyidikan, pemeriksaan saksi, dan kerugian negara sebagai inti persoalan yang diberitakan. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa media dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda terhadap peristiwa yang sama melalui proses seleksi informasi yang dilakukan dalam praktik jurnalistik.

Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian framing dalam studi komunikasi massa, khususnya pada pemberitaan korupsi di sektor pendidikan yang hingga saat ini masih relatif terbatas dibandingkan penelitian mengenai korupsi politik, pertambangan, maupun badan usaha milik negara. Dengan demikian, penelitian ini memperluas ruang kajian mengenai

hubungan antara media, korupsi, dan kebijakan pendidikan dalam konteks media digital Indonesia.

Selain memberikan kontribusi empiris terhadap kajian framing media, penelitian ini juga memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan studi komunikasi politik dan komunikasi publik di Indonesia. Selama ini, penelitian framing korupsi lebih banyak berfokus pada isu korupsi politik, kasus pejabat publik, atau korupsi pada sektor ekonomi dan sumber daya alam. Penelitian mengenai konstruksi media terhadap dugaan korupsi pada sektor pendidikan dan transformasi digital nasional masih relatif terbatas.

Dengan memilih kasus Chromebook Kemendikbud sebagai objek penelitian, penelitian ini memperluas ruang kajian mengenai hubungan antara media, kebijakan pendidikan, dan praktik pemberitaan korupsi pada era digital. Selain itu, penggunaan pendekatan komparatif antara Kompas.com dan Detik.com memberikan gambaran mengenai bagaimana perbedaan karakteristik editorial dapat menghasilkan konstruksi realitas yang berbeda terhadap peristiwa yang sama.

Kontribusi tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan kajian framing pada isu pendidikan, kebijakan publik, maupun transformasi digital di Indonesia.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa perbedaan framing media memiliki implikasi yang signifikan terhadap proses pembentukan opini publik mengenai isu korupsi di

sektor pendidikan. Ketika suatu media lebih menonjolkan aspek kebijakan dan tata kelola, perhatian masyarakat cenderung diarahkan pada evaluasi sistem, mekanisme pengambilan keputusan, dan kualitas kebijakan publik yang diterapkan pemerintah. Sebaliknya, ketika media lebih menonjolkan aspek hukum dan kriminalitas, perhatian publik lebih banyak terfokus pada individu, aktor, maupun proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.

Perbedaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa media memiliki kemampuan untuk memengaruhi arah diskursus publik mengenai suatu persoalan. Dalam konteks kasus Chromebook, Kompas.com cenderung mendorong pembaca untuk melihat pentingnya evaluasi terhadap kebijakan digitalisasi pendidikan, sedangkan Detik.com lebih mendorong perhatian masyarakat pada proses penyidikan dan pertanggungjawaban hukum pihak yang terlibat. Kedua pendekatan tersebut pada dasarnya sama-sama penting, namun menghasilkan fokus perhatian publik yang berbeda.

Dalam perspektif komunikasi publik, keberagaman framing justru dapat memberikan manfaat bagi masyarakat karena memungkinkan publik memperoleh sudut pandang yang lebih luas terhadap suatu persoalan. Namun demikian, kondisi tersebut juga menuntut kemampuan literasi media yang memadai agar masyarakat mampu memahami bahwa setiap pemberitaan merupakan hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh kebijakan redaksional, nilai berita, serta karakteristik masing-masing media.

Oleh karena itu, kemampuan untuk membandingkan informasi dari berbagai sumber menjadi penting agar masyarakat dapat membangun pemahaman yang lebih kritis dan komprehensif terhadap isu korupsi yang berkembang di ruang publik.

Dari perspektif konstruksi sosial Berger dan Luckmann (1966), media tidak sekadar merepresentasikan realitas sosial, tetapi secara aktif memproduksi dan mereproduksi realitas melalui proses seleksi, interpretasi, dan penonjolan fakta tertentu. Oleh karena itu, perbedaan framing yang dilakukan oleh Kompas.com dan Detik.com menunjukkan bahwa khalayak dapat memperoleh pemahaman yang berbeda terhadap kasus yang sama tergantung pada media yang dikonsumsi. Dalam konteks ini, media berperan sebagai aktor yang menentukan bagaimana publik memahami dugaan korupsi Chromebook, siapa yang dianggap bertanggung jawab, serta solusi apa yang dianggap paling tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Perbedaan framing yang dilakukan oleh Kompas.com dan Detik.com juga memiliki implikasi terhadap pembentukan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah maupun proses penegakan hukum. Ketika media lebih menonjolkan aspek kebijakan dan tata kelola, perhatian masyarakat cenderung diarahkan pada evaluasi sistem dan proses pengambilan keputusan. Sebaliknya, ketika media lebih menonjolkan aspek hukum dan kriminalitas, perhatian publik lebih banyak tertuju pada individu maupun aktor yang

dianggap bertanggung jawab terhadap terjadinya penyimpangan.

Dalam konteks komunikasi publik, kedua pendekatan tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda terhadap pembentukan opini masyarakat. Framing kebijakan dapat mendorong tuntutan reformasi sistem dan tata kelola, sedangkan framing hukum dapat memperkuat tuntutan terhadap penegakan hukum dan pemberian sanksi kepada pihak yang terlibat. Oleh karena itu, cara media mengonstruksi realitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap arah diskursus publik mengenai isu korupsi.

Berbeda dengan Kompas.com, Detik.com lebih banyak menggunakan diksi yang berkaitan dengan proses hukum dan penegakan hukum. Istilah seperti "penyidikan", "kerugian negara", "pemeriksaan saksi", "penetapan tersangka", dan "penyalahgunaan kewenangan" muncul secara dominan dalam pemberitaan yang dianalisis. Dominasi penggunaan istilah tersebut memperlihatkan bahwa media menempatkan aspek hukum sebagai pusat perhatian dalam konstruksi realitas yang dibangun.

Dari perspektif komunikasi politik, pilihan diksi tersebut berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat mengenai tingkat keseriusan kasus dan urgensi tindakan hukum terhadap pihak yang terlibat. Penekanan terhadap aspek kriminalitas juga dapat meningkatkan perhatian publik terhadap perkembangan penyidikan dan proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.

Selain itu, penggunaan bahasa yang berorientasi pada proses hukum memperlihatkan

adanya upaya media untuk menghadirkan narasi yang mudah dipahami oleh pembaca melalui penyederhanaan persoalan ke dalam kerangka sebab-akibat yang lebih jelas. Dalam konteks ini, publik diarahkan untuk memahami siapa yang dianggap bertanggung jawab serta bentuk pertanggungjawaban yang diharapkan terhadap para aktor yang terlibat.

Dengan demikian, penggunaan bahasa dalam pemberitaan Detik.com menjadi bagian penting dari strategi framing yang digunakan media dalam membentuk persepsi publik mengenai dugaan korupsi Chromebook Kemendikbud. Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan literasi media di masyarakat. Perbedaan framing antara Kompas.com dan Detik.com menunjukkan bahwa informasi yang diterima masyarakat tidak pernah sepenuhnya bersifat netral atau bebas nilai. Setiap media memiliki cara tersendiri dalam memilih fakta, menentukan narasumber, serta membangun penekanan terhadap aspek tertentu dari suatu peristiwa.

Dalam kondisi tersebut, masyarakat dituntut untuk memiliki kemampuan literasi media agar mampu memahami bahwa suatu berita merupakan hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan jurnalistik dan institusional. Kemampuan untuk membandingkan informasi dari berbagai sumber menjadi penting agar masyarakat tidak terjebak pada satu perspektif tertentu dalam memahami persoalan publik.

Literasi media juga menjadi semakin penting pada era digital ketika arus informasi bergerak

sangat cepat dan masyarakat dihadapkan pada berbagai sumber informasi yang saling bersaing memperebutkan perhatian publik. Dengan literasi media yang baik, masyarakat dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam menilai kredibilitas informasi serta memahami konteks yang melatarbelakangi suatu pemberitaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis framing menggunakan model Robert N. Entman, dapat disimpulkan bahwa Kompas.com dan Detik.com mengonstruksi realitas dugaan korupsi pengadaan Chromebook Kemendikbud dengan penekanan yang berbeda. Kompas.com cenderung membingkai kasus sebagai persoalan kebijakan publik yang berkaitan dengan tata kelola program digitalisasi pendidikan, efektivitas penggunaan Chromebook, serta proses pengambilan keputusan dalam lingkungan Kemendikbud. Sementara itu, Detik.com lebih menekankan aspek hukum melalui pemberitaan yang berfokus pada penyidikan, penetapan tersangka, kerugian negara, dan proses penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung. Perbedaan framing tersebut menunjukkan bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga berperan dalam membentuk pemahaman publik terhadap suatu peristiwa melalui proses seleksi dan penonjolan fakta tertentu. Penelitian ini memperlihatkan bahwa konstruksi realitas media terhadap kasus korupsi di sektor pendidikan dapat menghasilkan perspektif yang berbeda meskipun

bersumber pada peristiwa yang sama. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki literasi media yang memadai agar mampu memahami pemberitaan secara lebih kritis dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, R., Sumartias, S., & Nugraha, A. R. (2019). *Analisis framing pemberitaan korupsi massal DPRD Kota Malang pada media online Detik.com*. Jurnal Kajian Komunikasi.
- Arifin, M. S., Iskandar, D., & Sobari, T. (2020). *Robert Entman framing analysis of Saracen hoax issue news in Republika.co.id and Kompas.com*. Journal of Language Education Research.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Anchor Books.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58.
- Eriyanto. (2018). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Hildansyah, A., Nur, M., & Pauji, A. (2022). *Ketua KPK dalam bingkai media pada kasus korupsi Gubernur Papua di CNNIndonesia.com dan Detik.com*. Jurnal Komunikasi.
- Kramer, E. (2013). When news becomes entertainment: Representations of corruption in Indonesia's media and the implication of scandal. *Media Asia*.
- McQuail, D. (2010). *McQuail's Mass Communication Theory* (6th ed.). London: Sage Publications.
- Nabilla, N., Muharromah, S., & Putri, R. (2024). *Analisis framing berita kasus korupsi timah: Dampak kerugian negara Rp271 triliun pada Kompas.com dan Detik.com*. Jurnal Ilmu Komunikasi.
- Permatasari, D., & Yuanti, R. (2026). *Language use and media framing in the Pertamina corruption case in national and international media*. International Journal of Communication Studies.

Sovianti, D. (2019). *Analisis framing pemberitaan penangkapan kasus korupsi E-KTP Setya Novanto di media daring Detik.com dan Kompas.com*. Jurnal Komunikasi Indonesia.

Triwanto, A., Prasetyo, B., & Nugroho, F. (2025). *Framing analysis of news reporting on sugar commodity corruption case by Kompas.com*. Journal of Media Studies.